

**ANALISIS RENCANA KEBIJAKAN PEMBEDAAN SUBSIDI *PUBLIC SERVICE*
OBLIGATION (PSO) PADA TARIF KRL COMMUTER LINE WILAYAH
JABODETABEK (KRL JABODETABEK) BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN TINGGI**

Oleh Latif Putri Ma'rufah¹, Hendry Julian Noor²

INTISARI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan desain rencana kebijakan pembedaan subsidi PSO pada tarif KRL Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan tinggi yang saat ini sedang dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan; serta mengetahui dan merumuskan alternatif kebijakan subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang lebih mencerminkan prinsip pelayanan publik yang layak dan terjangkau.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sementara itu, data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kementerian Perhubungan saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek diiringi dengan pemberian subsidi PSO tambahan yang bersifat tepat sasaran bagi golongan kurang mampu, pelajar/mahasiswa, lansia, dan difabel. Tarif dasar KRL Jabodetabek yang semula Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) akan naik menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 25 km perjalanan pertama. Adapun kenaikan tarif tersebut telah disesuaikan dengan hasil kajian ATP/WTP yang dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus, yaitu YLKI, Litbang Kementerian Perhubungan, dan Konsultan pada Satuan Kerja LLAKA Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Sementara itu, terdapat dua alternatif kebijakan subsidi PSO yang dapat dijadikan sebagai opsi pilihan bagi regulator. Pertama, Kementerian Perhubungan dapat melakukan penyesuaian tarif progresif KRL Jabodetabek dibandingkan tarif dasar untuk 25 km pertama perjalanan. Kedua, melakukan revitalisasi infrastruktur penunjang KRL Jabodetabek dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dan Kereta Api.

Kata Kunci : KRL Jabodetabek, Subsidi PSO, Transportasi Publik

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**ANALYSIS OF DIFFERENTIATED *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO)
SUBSIDY POLICY ON KRL COMMUTER LINE JABODETABEK FOR
HIGH-INCOME PASSENGERS**

Oleh Latif Putri Ma'rufah³, Hendry Julian Noor⁴

ABSTRACT

This research aims to delineate the framework of the differentiated PSO subsidy policy for KRL Jabodetabek intended for high-income passengers, presently under formulation by the Ministry of Transportation. Furthermore, it endeavors to discern and craft alternative PSO subsidy policies for KRL Jabodetabek that embody principles of accessible and sufficient public service

This study adopts a descriptive empirical normative research approach. The data utilized consists of both primary and secondary sources. Primary data is obtained directly from the field through interviews with respondents and sources, while secondary data is derived from literature reviews.

The research findings indicate that the Ministry of Transportation is presently undertaking a policy revision concerning KRL Jabodetabek fares, coupled with targeted PSO subsidies for disadvantaged groups such as low-income individuals, students, seniors, and persons with disabilities. Initially set at Rp3.000,00 the base fare for KRL Jabodetabek will rise to Rp5.000,00 for the first 25 km of travel. This fare adjustment is grounded in the findings of ATP/WTP studies jointly conducted by three entities: YLKI, the Ministry of Transportation's Research and Development Agency, and consultants at the LLAKA Traffic and Railway Transport Directorate. Furthermore, two alternative PSO subsidy policies are proposed as regulatory options. Firstly, the Ministry of Transportation could implement a progressive fare adjustment for KRL Jabodetabek compared to the base fare for the first 25 km of travel. This approach would distribute supplementary operational expenses towards long-distance passenger segments, perceived as equitable due to their higher resource utilization. Secondly, revitalizing KRL Jabodetabek's supporting infrastructure could be pursued in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 on Minimum Service Standards for Passenger Transport and Railways.

Keywords: KRL Jabodetabek, PSO Subsidy, Public Transportation

³ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta